

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang merusak kehidupan para korban secara fisik, mental, dan trauma yang dialami korban dapat mempengaruhi psikologis mereka dalam jangka panjang. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan serta menjalankan sebagian fungsinya dalam upaya menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi UPTD PPA Kota Tangerang dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi anak korban kekerasan dan hambatan-hambatan UPTD PPA Kota Tangerang dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan layanan perlindungan anak.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran hasil penelitian dan untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi UPTD PPA Kota Tangerang dalam menyelenggarakan pengelolaan kasus dan pendampingan korban meliputi beberapa fungsi yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara mediasi dan pendamping korban serta koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemulihan korban. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan penulis di UPTD PPA Kota Tangerang. Namun, terdapat juga beberapa hambatan secara internal dan eksternal dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan kasus dan pendampingan korban, seperti kurangnya koordinasi dengan DP3AP2KB Kota Tangerang, edukasi yang tidak merata dan kurangnya perspektif masyarakat yang berpihak pada korban kekerasan seksual serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinergi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan layanan perlindungan bagi anak korban kekerasan.

Kata Kunci: Kekerasan, Kota Tangerang, Layanan, Perlindungan Anak, UPTD PPA Kota Tangerang.

ABSTRACT

Sexual violence is a serious problem that damages the lives of victims physically, mentally, and the trauma experienced by victims can affect their psychology in the long term. The Regional Technical Service Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Tangerang City has an important role in providing protection for children who are victims of violence and carries out some of its functions in an effort to deal with the problem of violence against women and children in Tangerang City. This study aims to determine the forms of implementation of the functions of UPTD PPA Tangerang City in organizing protection services for children who are victims of violence and the obstacles of UPTD PPA Tangerang City in carrying out its function to provide child protection services.

This thesis uses an empirical legal approach method. The data collection method is obtained through interviews, observations and literature studies. The analysis method applied is a descriptive qualitative analysis to provide an overview of the research results and to answer the problems.

The results of the study indicate that the function of the UPTD PPA of Tangerang City in organizing case management and victim assistance includes several functions, namely public complaints, victim outreach, case management, temporary shelter, mediation and victim assistance, and coordination with related parties in efforts to restore victims. This is in accordance with the provisions of the Tangerang Mayor Regulation Number 31 of 2022 concerning the Establishment, Position, Organizational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children at the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service and the results of interviews and observations conducted by the author at the UPTD PPA of Tangerang City. However, there are also several internal and external obstacles in carrying out the function of case management and victim assistance, such as lack of coordination with the DP3AP2KB of Tangerang City, uneven education and lack of community perspectives that side with victims of sexual violence and low levels of community understanding of sexual violence. Therefore, it is necessary to increase institutional capacity and synergy with various parties to optimize protection services for child victims of violence.

Keywords: *Violence, Tangerang City, Services, Child Protection, UPTD PPA Tangerang City.*